

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by Anang Haris Himawan. 1st ed. karanganyar: PUSTAKA PELAJAR, 2004.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. P.T. Alumni, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama Indonesia, and Rajawali Press. “Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia , Jakarta, Rajawali Press, 2003, Cetakan Ke IV, Hlm 6. 1 1” (2009): 1–10.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Alumni, 2023.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kansil, Cst, R. Engeline Palandeng, and Robert J Palandeng. *Kamus Istilah Hukum*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : rajawali Pers, 2013.

B. JURNAL

- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74.
- Effendy, Dalih, and Mesy. “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama.” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Evalina, Alissa, and Erwita Yeni. “Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah

- Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016” 3 (2019): 6.
<http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali” 3 (2022): 48–62.
- Indrayani, Ni Kadek Anggun, I Nyoman Lemes, and I Gede Arya Wira Sena. “Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.” *Kertha Widya* 11, no. 1 (2023): 24–45. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1525>.
- Kurnia, Asep. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ALIHDAYA DENGAN UPAH DIBAWAH KETENTUAN: TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM” 8, no. 1 (2024): 113–122.
- Luthfi, Muntaha. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 1, no. 1 (2022): 60–72.
- Nababan, Herlinca. “Panggilan / Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat (Analisa Perma No . 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perma No . 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik)” 4, no. 4 (2024): 644–
- Rahim, Abdur, Fajar Hidayat, Umar Hadid, and Warto. “Penyuluhan Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Indramayu” 4, no. 1 (2023): 204–213.
- Sayuti, Hosen dan Ageng Triganda. “Perkara Perdata, Small Claims Court .” *Inovatif* XI, no. September (2018): 155–173.
- Siregar, Nur Fitryani. “EFEKTIVITAS HUKUM.” *e-Journal STAI BARUMUN RAYA* 11, no. 1 (2018): 1–5.
- SITUNGKIR, DANIEL ADITIA. “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2023): 8–14.
- Sumiaty, Noneng. “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021): 56–67.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019.

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022.

———. *Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2019): 1–84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Presiden Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, 1986.

D. INTERNET

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.